

Malang Pos, 30 Agustus 2017

Masalah Kemiskinan Kini dan Esok  
Oleh : Novi Puji Lestari  
Pengajar Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Malang

Akhir-akhir ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kondisi capaian angka garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Itu artinya, meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan.

### **Masalah kemiskinan**

Upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan dan penurunan ketimpangan ekonomi selalu menjadi tugas berat setiap pemerintahan. Pelik dan rumitnya masalah kemiskinan membuat program pengurangan ketimpangan atau pemerataan ekonomi tidak bisa diharap seperti sulap. Belum berhasilnya program juga belum tentu karena kesalahan perencanaan.

Banyaknya penerima serta parameter yang harus dihitung membuat penyempurnaan program membutuhkan waktu dan ujian di lapangan. Fase penyempurnaan itulah yang kini sedang dihadapi program-program pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemerataan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan sampai saat ini banyak kritik dialamatkan pada program beras sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH), dan kartu Indonesia pintar (KIP).

Program pengurangan ketimpangan mestinya menjadikan kelompok miskin sebagai sasaran. Kritik-kritik itu berkaca pada kebocoran penyaluran penerima bansos. Fakta tersebut ditunjang dengan adanya kejadian di berbagai daerah masih dilaporkan adanya orang-orang yang tidak berhak justru masuk ke kelompok penerima bansos. Di sisi lain, rasio gini pada pemerintahan ini terbukti turun. Rasio gini sebesar 0,408 pada 2015 turun menjadi 0,393 pada 2017. Rasio gini 0,4 dikategorikan rawan atau lampu kuning. Dengan penurunan rasio gini tersebut harus diakui bahwa program bansos cukup efektif mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Program ini telah memutus program bantuan yang tidak efektif, yakni subsidi BBM yang terbukti tidak tepat sasaran. Perbaikan yang harus dilakukan ialah pada perbaikan target penerima bansos itu. Hanya dengan target yang presisi, jurang ketimpangan benar-benar dapat dikurangi. Hanya dengan itu pula pemerintah akan membuktikan bahwa penekanan angka kemiskinan di bawah level 10 persen bukan isapan jempol.

Maka, kita mendukung Menko Perekonomian Darmin Nasution yang akan memfokuskan target penerima bansos. Salah satu caranya dengan pemutakhiran dan pengintegrasian data penerima subsidi. Darmin mengungkapkan bahwa dari penyisiran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap 22,8 juta pelanggan, nyatanya hanya 4,1 juta pelanggan yang layak menerima subsidi.

Berangkat dari jumlah itu pun diperkirakan setelah verifikasi lanjutan hanya ada penambahan 2,44 juta penerima subsidi, baik dalam bentuk rastra maupun energi berbasis nontunai. Data terbaru inilah yang semestinya digunakan instansi-instansi dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap pelaksanaan dari penerima bansos juga harus diperketat.

## **Penanganan kemiskinan**

Munculnya kemiskinan bukan karena tidak adanya sumber kemakmuran. Namun, sumber kemakmuran tersebut lebih banyak dikuasai sekelompok tertentu. Akses orang miskin terhadap sumber kemakmuran tersebut sangat rendah dan lemah. Berangkat dari kenyataan tersebut, berikut ini sekiranya alternative solusi yang mungkin bisa dijadikan jalan menuju penghapusan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran di negeri ini.

**Pertama**, pembangunan harus didasari solusi-solusi berbasis bukti yang baru. Di tengah pesimisme global beberapa tahun terakhir, harus diingat bahwa persentase penduduk termiskin turun sebanyak 50 persen dalam 25 tahun terakhir. Ini merupakan rekor bersejarah dalam membawa penduduk dunia keluar dari kemiskinan ekstrem.

Mari kita belajar dari perkembangan di Afrika. Menjelang 2015, sekitar 41,2 persen penduduk Afrika diperkirakan masih hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari. Bandingkan dengan di Asia Selatan yang 24 persen serta di Asia Timur dan Pasifik yang 7,7 persen. Angka-angka ini menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi oleh Afrika, meski harus diakui benua ini mulai bergerak ke arah yang benar mengingat pada tahun 2008 jumlah penduduk Afrika yang hidup di bawah garis kemiskinan masih 47 persen.

**Kedua**, kita perlu lebih memperhatikan masalah kesetaraan dan keadilan dalam proses pembangunan ekonomi. Kita perlu mengambil langkah aktif untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat tingkat bawah dan menengah. Kita perlu menyadari bahwa lapangan pekerjaan adalah dasar dari pembangunan dan 90 persen dari seluruh lapangan pekerjaan di dunia berkembang berasal dari sektor swasta. Pemerintah harus menciptakan iklim usaha terbaik untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

**Ketiga**, kita perlu lebih fokus pada hasil dan implementasi dalam segala upaya pembangunan. Kita perlu membuahkan lebih banyak hasil dengan sumber daya yang terbatas. Karena itu, kita perlu berpikir secara lebih ilmiah dalam memberikan pelayanan publik dengan membangun sistem-sistem kuat yang dapat diandalkan dan mampu bertahan.

Di tengah perekonomian global seperti sekarang ini, kita harus kukuh bersatu padu. Kita perlu membuka jalur yang mengarah pada kemakmuran dan tidak meninggalkan siapa pun. Martin Luther King Jr menggambarkan ambisi universal untuk meraih kemajuan dan harga diri ini dengan kutipan berikut: "Lengkungan busur moral dari alam semesta berada pada lengan keadilan."

Oleh sebab itu, sudah tiba saatnya pemerintah dan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan dinegeri ini dengan dorongan kuat mewujudkan mencapai hasil pembangunan, kita bisa, kita harus, dan kita akan mengakhiri kemiskinan dan membangun kemakmuran setara. Semua demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan.